



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 61 /POJK.05/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR  
12/POJK.05/2014 TENTANG PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN  
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

**CONTOH FORMAT LAPORAN PERUBAHAN MODAL LEMBAGA KEUANGAN MIKRO**

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Otoritas Jasa Keuangan

Melalui Kantor OJK/Bupati/Walikota/Pihak lain yang ditunjuk oleh OJK\*).....

Jl .....

.....

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ...../POJK.05/2015, dengan ini kami laporkan bahwa sesuai dengan RUPS PT LKM/LKMS\*) tanggal .... bulan .... tahun ..... telah dilakukan perubahan modal, yaitu:

	Lama	Baru
Modal dasar	....	....
Modal disetor	....	....

Lama			Baru		
Nama Pemegang Saham	Nilai saham		Nama Pemegang Saham	Nilai saham	
	Rp	%		Rp	%
....	....		....	....	
....	....		....	....	

Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan:

1. Bukti perubahan modal yang telah disetujui atau dilaporkan kepada instansi berwenang;
2. Data pemegang saham baru (jika ada):
  - a. Dalam hal perorangan wajib dilampiri dengan:
    - 1) fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; dan
    - 2) surat pernyataan bermeterai bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman dan tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang.
  - b. Dalam hal berbentuk koperasi atau badan usaha milik desa/kelurahan\*) wajib dilampiri dengan:
    - 1) akta pendirian termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) atau bukti pendirian badan usaha milik desa/kelurahan\*);
    - 2) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan terakhir atau pembukuan keuangan terakhir;
    - 3) fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku bagi Direksi atau pengurus badan usaha milik desa/kelurahan\*) dan/atau koperasi;
    - 4) surat pernyataan bermeterai bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman dan tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang.

c. Dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota\*), dokumen yang dilampirkan adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota\*) terkait penyertaan modal pada LKM.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu\*), kami mengucapkan terima kasih.

....., tanggal, bulan, tahun  
Direksi  
PT LKM/LKMS\*) .....

.....

\*) coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Sudarmaji